BAB III

OBJEK PENELITIAN

3.1 Sejarah Kota Bandung

Mengenai asal-usul nama "Bandung", dikemukakan berbagai pendapat. Sebagian mengatakan bahwa, kata "Bandung" dalam bahasa Sunda, identik dengan kata "banding" dalam Bahasa Indonesia, berarti berdampingan. Ngabanding (Sunda) berarti berdampingan atau berdekatan. Hal ini antara lain dinyatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka (1994) dan Kamus Sunda-Indonesia terbitan Pustaka Setia (1996), bahwa kata bandung berarti berpasangan dan berarti pula berdampingan.

Pendapat lain mengatakan, bahwa kata "bandung" mengandung arti besar atau luas. Kata itu berasal dari kata bandeng. Dalam bahasa Sunda, ngabandeng berarti genangan air yang luas dan tampak tenang, namun terkesan menyeramkan. Diduga kata bandeng itu kemudian berubah bunyi menjadi Bandung. Bahkan ada juga pendapat yang menyatakan bahwa kata Bandung berasal dari kata bendung. Pendapat-pendapat tentang asal dan arti kata Bandung, rupanya berkaitan dengan peristiwa terbendungnya aliran Sungai Citarum purba di daerah Padalarang oleh lahar Gunung Tangkuban Parahu yang meletus pada masa holosen (± 6000 tahun yang lalu). Akibatnya, daerah antara Padalarang sampai Cicalengka (± 30 kilometer) dan daerah antara Gunung Tangkuban Parahu sampai Soreang (± 50 kilometer) terendam menjadi sebuah danau besar yang kemudian dikenal dengan sebutan Danau Bandung atau Danau Bandung Purba.

Berdasarkan hasil penelitian geologi, air Danau Bandung diperkirakan mulai surut pada masa neolitikum (± 8000 - 7000 sebelum Masehi). Proses surutnya air danau itu berlangsung secara bertahap dalam waktu berabad-abad. Secara historis, kata atau nama Bandung mulai dikenal sejak di daerah bekas danau tersebut berdiri pemerintah Kabupaten bandung (sekitar decade ketiga abad ke-17). Dengan demikian, sebutan Danau Bandung terhadap danau besar itu pun terjadi setelah berdirinya Kabupaten Bandung.

3.1.1 BerdirinyaKabupatenBandung

Sebelum *Kabupaten Bandung* berdiri, daerah Bandung dikenal dengan sebutan "Tatar Ukur". Menurut naskah Sadjarah Bandung, sebelum Kabupaten Bandung berdiri, Tatar Ukur adalah termasuk daerah Kerajaan Timbanganten dengan ibukota Tegalluar. Kerajaan itu berada dibawah dominasi Kerajaan Sunda-Pajajaran. Sejak pertengahan abad ke-15, Kerajaan Timbanganten diperintah secara turun temurun oleh Prabu Pandaan Ukur, Dipati Agung, dan Dipati Ukur. Pada masa pemerintahan Dipati Ukur, Tatar Ukur merupakan suatu wilayah yang cukup luas, mencakup sebagian besar wilayah Jawa Barat, terdiri atas sembilan daerah yang disebut "Ukur Sasanga".

Setelah Kerajaan Sunda-Pajajaran runtuh (1579/1580) akibat gerakan Pasukan banten dalam usaha menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat, Tatar Ukur menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Sumedanglarang, penerus Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Sumedanglarang didirikan dan diperintah pertama kali oleh Prabu Geusan Ulun pada

(1580-1608), dengan ibukota di Kutamaya, suatu tempat yang terletak sebelah Barat kota Sumedang sekarang. Wilayah kekuasaan kerajaan itu meliputi daerah yang kemudian disebut Priangan, kecuali daerah Galuh (sekarang bernama Ciamis).

Ketika Kerajaan Sumedang Larang diperintah oleh Raden Suriadiwangsa, anak tiri Geusan Ulun dari rtu Harisbaya, Sumedanglarang menjadi daerah kekuasaan Mataram sejak tahun 1620. Sejak itu status Sumedanglarang pun berubah dari kerajaan menjadi kabupaten dengan nama Kabupaten Sumedang. Mataram menjadikan Priangan sebagai daerah pertahanannya di bagian Barat terhadap kemungkinan serangan Pasukan Banten dan atau Kompeni yang berkedudukan di Batavia, karena Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) bermusuhan dengan Kompeni dan konflik dengan Kesultanan Banten. Untuk mengawasi wilayah Priangan, Sultan Agung mengangkat Raden Aria Suradiwangsa menjadi Bupati Wedana (Bupati Kepala) di Priangan (1620-1624), dengan gelar Pangeran Rangga Gempol Kusumadinata, terkenal dengan sebutan Rangga Gempol I.

Tahun 1624 Sultan agung memerintahkan Rangga Gempol I untuk menaklukkan daerah Sampang (Madura). Karenanya, jabatan Bupati Wedana Priangan diwakilkan kepada adik Rangga Gempol I pangeran Dipati Rangga Gede. Tidak lama setelah Pangeran Dipati Rangga Gede menjabat sebagai Bupati Wedana, Sumedang diserang oleh Pasukan Banten. Karena sebagian Pasukan Sumedang berangkat ke Sampang, Pangeran Dipati Rangga Gede tidak dapat mengatasi serangan tersebut. Akibatnya, ia menerima sanksi politis dari Sultan Agung. Pangeran Dipati Rangga Gede ditahan di

Mataram. Jabatan Bupati Wedana Priangan diserahkan kepada Dipati Ukur, dengan syarat ia harus dapat merebut Batavia dari kekuasaan Kompeni. Tahun 1628 Sultan Agung memerintahkan Dipati Ukur untuk membantu pasukan Mataram menyerang Kompeni di Batavia.

Akan tetapi serangan itu mengalami kegagalan. Dipati Ukur menyadari bahwa sebagai konsekwensi dari kegagalan itu ia akan mendapat hukuman seperti yang diterima oleh Pangeran Dipati Rangga gede, atau hukuman yang lebih berat lagi. Oleh karena itu Dipati Ukur beserta para pengikutnya membangkang terhadap Mataram. Setelah penyerangan terhadap Kompeni gagal, mereka tidak datang ke Mataram melaporkan kegagalan tugasnya. Tindakan Dipati Ukur itu dianggap oleh pihak Mataram sebagai pemberontakan terhadap penguasa Kerajaan Mataram.

Terjadinya pembangkangan Dipati Ukur beserta para pengikutnya dimungkinkan, antara lain karena pihak Mataram sulit untuk mengawasi daerah Priangan secara langsung, akibat jauhnya jarak antara Pusat Kerajaan Mataram dengan daerah Priangan. Secara teoritis, bila daerah tersebut sangat jauh dari pusat kekuasaan, maka kekuasaan pusat di daerah itu sangat lemah. Walaupun demikian, berkat bantuan beberapa Kepala daerah di Priangan, pihak Mataram akhirnya dapat memadamkan pemberontakan Dipati Ukur.

Menurut Sejarah Sumedang (babad), Dipati Ukur tertangkap di Gunung Lumbung (*daerah Bandung*) pada tahun 1632. Setelah "pemberontakan" Dipati Ukur dianggap

berakhir, Sultan Agung menyerahkan kembali jabatan Bupati Wedana Priangan kepada Pangeran Dipati Rangga Gede yang telah bebas dari hukumannya. Selain itu juga dilakukan reorganisasi pemerintahan di Priangan untuk menstabilkan situasi dan kondisi daerah tersebut. Daerah Priangan di luar Sumedang dan Galuh dibagi menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung, Kabupaten Parakanmuncang dan Kabupaten Sukapura dengan cara mengangkat tiga kepala daerah dari Priangan yang dianggap telah berjasa menumpas pemberontakan Dipati Ukur.

Ketiga orang kepala daerah dimaksud adalah Ki Astamanggala, umbul Cihaurbeuti diangkat menjadi mantri agung (bupati) Bandung dengan gelar Tumenggung Wiraangunangun, Tanubaya sebagai bupati Parakanmuncang dan Ngabehi Wirawangsa menjadi bupati Sukapura dengan gelar Tumenggung Wiradadaha. Ketiga orang itu dilantik secara bersamaan berdasarkan "Piagem Sultan Agung", yang dikeluarkan pada hari Sabtu tanggal 9 Muharam Tahun Alip (penanggalan Jawa). Dengan demikian, tanggal 9 Muharam Taun Alip bukan hanya merupakan hari jadi Kabupagten Bandung tetapi sekaligus sebagai hari jadi Kabupaten Sukapura dan Kabupaten Parakanmuncang.

Berdirinya Kabupaten Bandung, berarti di daerah Bandung terjadi perubahan terutama dalam bidang pemerintahan. Daerah yang semula merupakan bagian (bawahan) dari pemerintah kerajaan (Kerajaan Sunda-Pajararan kemudian Sumedanglarang) dengan status yang tidak jelas, berubah menjadi daerah dengan sttus administrative yang jelas, yaitu kabupaten.Setelah ketiga bupati tersebut dilantik di pusat pemerintahan Mataram, mereka kembali ke daerah masing-masing. Sadjarah Bandung (naskah) menyebutkan

bahwa Bupati Bandung Tumeggung Wiraangunangun beserta pengikutnya dari Mataram kembali ke Tatar Ukur.

Pertama kali mereka dating ke Timbanganten. Di sana bupati Bandung mendapatkan 200 cacah. Selanjutnya Tumenanggung Wiraangunangun bersama rakyatnya membangun Krapyak, sebuah tempat yang terletak di tepi Sungat Citarum dekat muara Sungai Cikapundung, (daerah pinggiran Kabupaten Bandung bagian Selatan) sebagai ibukota kabupaten. Sebagai daerah pusat kabupaten Bandung, Krapyak dan daerah sekitarnya disebut Bumi kur Gede.Wilayah administrative Kabupaten Bandung di bawah pengaruh Mataram (hingga akhir abad ke-17), belum diketahui secara pasti, karena sumber akurat yang memuat data tentang hal itu tidak/belum ditemukan.

Menurut sumber pribumi, data tahap awal Kabupaten Bandung meliputi beberapa daerah antara lain Tatar Ukur, termasuk daerah Timbanganten, Kuripan, Sagaraherang, dan sebagian Tanahmedang. Boleh jadi, daerah Priangan di luar Wilayah Kabupaten Sumedang, Parakanmuncang, Sukapura dan Galuh, yang semula merupakan wilayah Tatar Ukur (Ukur Sasanga) pada masa pemerintahan Dipati Ukur, merupakan wilayah administrative Kabupaten Bandung waktu itu. Bila dugaan ini benar, maka Kabupaten Bandung dengan ibukota Krapyak, wilayahnya mencakup daerah Timbanganten, Gandasoli, Adiarsa, Cabangbungin, Banjaran, Cipeujeuh, Majalaya, Cisondari, Rongga, Kopo, Ujungberung dan lain-lain, termasuk daerah Kuripan, Sagaraherang dan Tanahmedang.

Kabupaten Bandung sebagai salah satu Kabupaten yang dibentuk Pemerintah Kerajaan Mataram, dan berada di bawah pengaruh penguasa kerajaan tersebut, maka sistem pemerintahan Kabupaten Bandung memiliki sistem pemerintahan Mataram. Bupati memiliki berbagai jenis symbol kebesaran, pengawal khusus dan prajurit bersenjata. Simbol dan atribut itu menambah besar dan kuatnya kekuasaan serta pengaruh Bupti atas rakyatnya. Besarnya kekuasaan dan pengaruh bupati, antara lain ditunjukkan oleh pemilikan hak-hak istimewa yang biasa dmiliki oleh raja. Hak-hak dimaksud adalah hak mewariskan jabatan, ha memungut pajak dalam bentuk uang dan barang, ha memperoleh tenaga kerja (ngawula), hak berburu dan menangkap ikan dan hak mengadili.

Dengan sangat terbatasnya pengawasan langsung dari penguasa Mataram, maka tidaklah heran apabila waktu itu Bupati Bandung khususnya dan Bupati Priangan umumnya berkuasa seperti raja. Ia berkuasa penuh atas rakyat dan daerahnya. Sistem pemerinatahn dan gaya hidup bupati merupakan miniatur dari kehidupan keraton. Dalam menjalankan tugasnya, bupati dibantu oleh pejabat-pejabat bawahannya, seperti patih, jaksa, penghulu, demang atau kepala cutak (kepala distrik), camat (pembantu kepala distrik), patinggi (lurah atau kepala desa) dan lain-lain.Kabupaten Bandung berada dibawah pengaruh Mataram sampai akhir tahun 1677.

Kemudian Kabupaten Bandung jatuh ketangan Kompeni. Hal itu terjadi akibat perjanjian Mataram-Kompeni (perjanjian pertama) tanggal 19-20 Oktober 1677. Di bawah kekuasaan Kompeni (1677-1799), Bupati Bandung dan Bupati lainnya di Priangan

tetap berkedudukan sebagai penguasa tertinggi di kabupaten, tanpa ikatan birokrasi dengan Kompeni.Sistem pemerintahan kabupaten pada dasarnya tidak mengalami perubahan, karena Kompeni hanya menuntut agar bupati mengakui kekuasaan Kompeni, dengan jaminan menjual hasil-hasil bumi tertentu kepada VOC.

Dalam hal ini bupati tidak boleh mengadakan hubungan politik dan dagang dengan pihak lain. Satu hal yang berubah adalah jabatan bupati wedana dihilangkan. Sebagai gantinya, Kompeni mengangkat Pangeran Aria Cirebon sebagai pengawas (opzigter) daerah Cirebon-Priangan (Cheribonsche Preangerlandan). Salah satu kewajiban utama bupati terhadap kompeni adalah melaksanakan penanaman wajib tanaman tertentu, terutama kopi, dan menyerahkan hasilnya. Sistem penanaman wajib itu disebut Preangerstelsel. Sementara itu bupati wajib memelihara keamanan dan ketertiban daerah kekuasaannya.

Bupati juga tidak boleh mengangkat atau memecat pegawai bawahan bupati tanpa pertimbangan Bupati Kompeni atau penguasa Kompeni di Cirebon. Agar bupati dapat melaksanakan kewajiban yang disebut terakhir dengan baik, pengaruh bupati dalam bidang keagamaan, termasuk penghasilan dari bidang itu, seperti bagian zakar fitrah, tidak diganggu baik bupati maupun rakyat (petani) mendapat bayaran atas penyerahan kopi yang besarnya ditentukan oleh Kompeni.

Hingga berakhirnya kekuasaan Kompeni-VOC akhir tahun 1779, Kabupaten Bandung beribukota di Krapyak. Selama itu Kabupaten Bandung diperintah secara turun

temurun oleh enam orang bupati. **Tumenggung Wiraangunangun** (merupakan bupati pertama) ankatan Mataram yang memerintah sampai tahun 1681. Lima bupati lainnya adalah bupati angkatan Kompeni yakni Tumenggung Ardikusumah yang memerintah tahun 1681-1704, Tumenggung Anggadireja I (1704-1747), Tumenggung Anggadireja II (1747-1763), R. Anggadireja III dengan gelar R.A. Wiranatakusumah I (1763-1794) dan R.A. Wiranatakusumah II yang memerintah dari tahun 1794 hingga tahun 1829. Pada masa pemerintahan bupati R.A. Wiranatakusumah II, ibukota Kabupaten Bandung dipindahkan dari Karapyak ke Kota Bandung.

3.1.2 Berdirinya Kota Bandung

Ketika Kabupaten Bandung dipimpin oleh Bupati RA Wiranatakusumah II, kekuasaan Kompeni di Nusantara berakhir akibat VOC bangkrut (Desember 1799). Kekuasaan di Nusantara selanjutnya diambil alih oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan Gubernur Jenderal pertama Herman Willem Daendels (1808-1811). Sejalan dengan perubahan kekuasaan di Hindia Belanda, situasi dan kondisi Kabupaten Bandung mengalami perubahan. Perubahan yang pertama kali terjadi adalah pemindahan ibukota kabupaten dari Krapyak di bagian Selatan daerah Bandung ke Kota Bandung yang ter;etak di bagian tengah wilayah kabupaten tersebut. Antara Januari 1800 sampai akhir Desember 1807 di Nusantara umumnya dan di Pulau Jawa khususnya, terjadi vakum kekuasaan asing (penjajah), karena walaupun Gubernur Jenderal Kompeni masih ada, tetapi ia sudah tidak memiliki kekuasaan. Bagi para bupati, selama vakum kekuasaan itu berarti hilangnya beban berupa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi bagi kepentingan penguasa asing (penjajah). Dengan demikian, mereka dapat mencurahkan

perhatian bagi kepentingan pemerintahan daerah masing-masing. Hal ini kiranya terjadi pula di Kabupaten Bandung.

Menurut naskah Sadjarah Bandung, pada tahun 1809 Bupati Bandung Wiranatakusumah II beserta sejumlah rakyatnya pindah dari Karapyak ke daerah sebelah Utara dari lahan bakal ibukota. Pada waktu itu lahan bakal Kota Bandung masih berupa hutan, tetapi di sebelah utaranya sudah ada pemukiman, yaitu Kampung Cikapundung Kolot, Kampung Cikalintu, dan Kampung Bogor. Menurut naskah tersebut, Bupati R.A. Wiranatakusumah II pindah ke Kota Bandung setelah ia menetap di tempat tinggal sementara selama dua setengah tahun. Semula bupati tinggal di Cikalintu (daerah Cipaganti) kemudian ia pindah Balubur Hilir.

Ketika Deandels meresmikan pembangunan jembatan Cikapundung (jembatan di Jl. Asia Afrika dekat Gedung PLN sekarang), Bupati Bandung berada disana. Deandels bersama Bupati melewati jembatan itu kemudian mereka berjalan ke arah timur sampai disuatu tempat (depan Kantor Dinas PU Jl. Asia Afrika sekarang). Di tempat itu deandels menancapkan tongkat seraya berkata: "Zorg, dat als ik terug kom hier een stad is gebouwd!" (Usahakan, bila aku datang kembali ke sini, sebuah kota telah dibangun!".

Rupanya Deandels menghendaki pusat kota Bandung dibangun di tempat itu. Sebagai tindak lanjut dari ucapannya itu, Deandels meminta Bupati Bandung dan Parakanmuncang untuk memindahkan ibukota kabupaten masing-masing ke dekat Jalan Raya Pos. Permintaan Deandels itu disampaikan melalui surat tertanggal 25 Mei 1810.

indahnya Kabupaten Bandung ke Kota Bandung bersamaan dengan pengangkatan Raden Suria menjadi Patih Parakanmuncang. Kedua momentum tersebut dikukuhkan dengan besluit (surat keputusan) tanggal 25 September 1810. Tanggal ini juga merupakan tanggal Surat Keputusan (besluit), maka secara yuridis formal (dejure) ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Bandung.Boleh jadi bupati mulai berkedudukan di Kota Bandung setelah di sana terlebih dahulu berdiri bangunan pendopo kabupaten. Dapat dipastikan pendopo kabupaten merupakan bangunan pertama yang dibangun untuk pusat kegiatan pemerintahan Kabupaten Bandung.

Berdasarkan data dari berbagai sumber, pembangunan Kota Bandung sepenuhnya dilakukan oleh sejumlah rakyat Bandung dibawah pimpinan Bupati R.A. Wiranatakusumah II. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa bupati R.A. Wiranatakusumah II adalah pendiri (the founding father) kota Bandung. Berkembangnya Kota Bandung dan letaknya yang strategis yang berada di bagian tengah Priangan, telah mendorong timbulnya gagasan Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1856 untuk memindahkan Ibukota Keresiden priangan dari Cianjur ke Bandung.

Gagasan tersebut karena berbagai hal baru direalisasikan pada tahun 1864. Berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal tanggal 7 Agustus 1864 No.18, Kota Bandung ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Keresidenan Priangan. Dengan demikian, sejak saat itu Kota Bandung memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai Ibukota Kabupaten Bandung sekaligus sebagai ibukota Keresidenan Priangan. Pada waktu itu yang menjadi Bupati Bandung adalah R.A. Wiranatakusumah IV (1846-1874).

Sejalan dengan perkembangan fungsinya, di Kota Bandung dibangun gedung keresidenan di daerah Cicendo (sekarang menjadi Rumah Dinas Gubernur Jawa Barat) dan sebuah hotel pemerintah. Gedung keresidenan selesai dibangun tahun 1867. Perkembangan Kota Bandung terjadi setelah beroperasi transportasi kereta api dari dan ke kota Bandung sejak tahun 1884. Karena Kota Bandung berfungsi sebagai pusat kegiatan transportasi kereta api "Lin Barat", maka telah mendorong berkembangnya kehidupan di Kota Bandung dengan meningkatnya penduduk dari tahun ke tahun.

Di penghujung abad ke-19, penduduk golongan Eropa jumlahnya sudah mencapai ribuan orang dan menuntut adanya lembaga otonom yang dapat mengurus kepentingan mereka. Sementara itu pemerintah pusat menyadari kegagalan pelaksanaan sistem pemerintahan sentralistis berikut dampaknya. Karenanya, pemerintah sampai pada kebijakan untuk mengganti sistem pemerintahan dengan sistem desentralisasi, bukan hanya desentralisasi dalam bidang keuangan, tetapi juga desentralisasi dalam pemberian hak otonomi bidang pemerintahan (zelfbestuur) Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Bandung di bawah pimpinan Bupati RAA Martanagara (1893-1918) menyambut baik gagasan pemerintah kolonial tersebut.

Berlangsungnya pemerintahan otonomi di Kota Bandung, berarti pemerintah kabupaten mendapat dana budget khusus dari pemerintah kolonial yang sebelumnya tidak pernah ada.Berdasarkan Undang-undang Desentralisasi (Decentralisatiewet) yang

dikeluarkan tahun 1903 dan Surat Keputusan tentang desentralisasi (Decentralisasi Besluit) serta Ordonansi Dewan Lokal (Locale Raden Ordonantie) sejak tanggal 1 April 1906 ditetapkan sebagai gemeente (kotapraja) yang berpemerintahan otonomom. Ketetapan itu semakin memperkuat fungsi Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan, terutama pemerintahan Kolonial Belanda di Kota Bandung. Semula Gemeente Bandung Dipimpin oleh Asisten Residen priangan selaku Ketua Dewan Kota (Gemeenteraad), tetapi sejak tahun 1913 gemeente dipimpin oleh burgemeester (walikota).[1]

3.1.2 Mahasiswa Pendatang di Kota Bandung

Selain kaya akan sejarah dan kulinernya kota bandung adalah salah satu kota pelajar. Setiap tahunnya kota bandung menjadi tujuan mahasiswa pendatang yang mau melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di kota bandung. Banyaknya universitas di kota bandung yang di tunjang dengan berbagai macam fasilitas yang baik sangat merangsang para mahasiswa dari luar kota untuk berdatangan menuntut ilmu di kota bandung. Keluar masuknya mahasiswa pendatang ke dalam kota bandung tidak terlepas dari keinginan mereka untuk dapat masuk di dalam berbagai universitas yang terdapat di kota bandung.

Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tahun 2010 mahasiswa pendatang yang tercatat di kelurahan-kelurahan sebanyak 2292 orang, data tersebut bisa berubah mengingat masih banyaknya mahasiswa pendatang yang belum terdaftar atau yang belum memiliki SKTS (Surat Keterangan Tinggal Sementara).

[1] http://bandung.blogspot.com/2008/05/sejarah-bandung.html

3.3 Nilai- nilai Budaya Sunda

Menurut Bapak Pangeran Djatikusumah pengertian Sunda terdiri dari 3 bagian yaitu : Sunda Etnis, Sunda Filosofis dan Sunda Geografis. Sunda Etnis adalah yang terdapat di pulau jawa bagian barat yang kemudian disebut dengan jawa barat atau disebut juga dengan Pasundan karena disitulah tinggal etnis-etnis sunda, sunda filosofis mempunyai arti indah, putih, cemerlang dan bersinar. Bersinar disini mempunyai arti sebuah karaktersitik dari pengertian sunda sementara sunda Geografis adalah Sunda besar dan Sunda kecil yaitu Indonesia.

Sunda berasal dari kata Su yang berarti segala sesuatu yang mengandung unsur kebaikan. Orang Sunda meyakini bahwa memiliki etos atau karakter Kasundaan, sebagai jalan menuju keutamaan hidup. Karakter Sunda yang dimaksud adalah *cageur* (sehat), *bageur* (baik), *bener* (benar), *singer* (mawas diri), dan *pinter* (cerdas). Karakter ini telah dijalankan oleh masyarakat yang bermukim di Jawa bagian barat sejak jaman Kerajaan Salakanagara.[2]

Makna kata Sunda sangat luhur, yakni cahaya, cemerlang, putih, atau bersih. Makna kata Sunda itu tidak hanya ditampilkan dalam penampilan, tapi juga didalami dalam hati. Karena itu, orang Sunda yang 'nyunda' perlu memiliki hati yang luhur pula. Itulah yang perlu dipahami bila mencintai, sekaligus bangga terhadap budaya Sunda yang dimilikinya. Setiap bangsa memiliki etos, kultur, dan budaya yang berbeda. Namun tidaklah heran jika ada bangsa yang berhasrat menanamkan etos budayanya kepada bangsa lain. Karena beranggapan, bahwa etos dan kultur budaya memiliki kelebihan.

[2] http://www.kasundaan.org/id/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=82

Kecenderungan ini terlihat pada etos dan kultur budaya bangsa kita, karena dalam beberapa dekade telah terimbas oleh budaya bangsa lain. Arus modernisasi menggempur budaya nasional yang menjadi jati diri bangsa. Budaya nasional kini terlihat sangat kuno, bahkan ada generasi muda yang malu mempelajarinya. Kemampuan menguasai kesenian tradisional dianggap tak bermanfaat. Rasa bangsa kian terkikis, karena budaya bangsa lain lebih terlihat menyilaukan. Kondisi memprihatinkan ini juga terjadi pada budaya Sunda, sehingga orang Sunda kehilangan jati dirinya.

Untuk menghadapi keterpurukan kebudayaan Sunda, ada baiknya kita melangkah ke belakang dulu. Mempelajari, dan mengumpulkan pasir mutiara yang berserakan selama ini. Banyak petuah bijak dan khazanah ucapan nenek moyang jadi berkarat, akibat tidak pernah tersentuh pemiliknya. Hal ini disebabkan keengganan untuk mempelajari dengan seksama, bahkan mereka beranggapan ketinggalan zaman. Bila dipelajari, sebenarnya pancaran etika moral Sunda memiliki khazanah hikmah yang luar biasa. Hal itu terproyeksikan lewat tradisinya. Karena itu, marilah kita kenali kembali, dan menguak beberapa butir peninggalan nenek moyang Sunda yang hampir.

Ada beberapa etos atau watak dalam budaya Sunda tentang satu jalan menuju keutamaan hidup. Selain itu, etos dan watak Sunda juga dapat menjadi bekal keselamatan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Etos dan watak Sunda itu ada lima, yakni cageur, bageur, bener, singer, dan pinter yang sudah lahir sekitar jaman Salakanagara dan Tarumanagara. Ada bentuk lain ucapan sesepuh Sunda yang lahir pada abad tersebut. Lima kata itu diyakini mampu menghadapi keterpurukan akibat penjajahan pada zaman

itu. Coba kita resapi pelita kehidupan lewat lima kata itu. Semua ini sebagai dasar utama urang Sunda yang hidupnya harus 'nyunda', termasuk para pemimpin bangsa.

Cara meresapinya dengan memahami artinya. Cageur, yakni harus sehat jasmani dan rohani, sehat berpikir, sehat berpendapat, sehat lahir dan batin, sehat moral, sehat berbuat dan bertindak, sehat berprasangka atau menjauhkan sifat suudzonisme. Bageur yaitu baik hati, sayang kepada sesama, banyak memberi pendapat dan kaidah moril terpuji ataupun materi, tidak pelit, tidak emosional, baik hati, penolong dan ikhlas menjalankan serta mengamalkan, bukan hanya dibaca atau diucapkan saja. Bener yaitu tidak bohong, tidak asal-asalan dalam mengerjakan tugas pekerjaan, amanah, lurus menjalankan agama, benar dalam memimpin, berdagang, tidak memalsu atau mengurangi timbangan, dan tidak merusak alam. Singer, yaitu penuh mawas diri bukan was-was, mengerti pada setiap tugas, mendahulukan orang lain sebelum pribadi, pandai menghargai pendapat yang lain, penuh kasih sayang, tidak cepat marah jika dikritik tetapi diresapi makna esensinya. Pinter, yaitu pandai ilmu dunia dan akhirat, mengerti ilmu agama sampai ke dasarnya, luas jangkauan ilmu dunia dan akhirat walau berbeda keyakinan, pandai menyesuaikan diri dengan sesama, pandai mengemukakan dan membereskan masalah pelik dengan bijaksana, dan tidak merasa pintar sendiri sambil menyudutkan orang lain.

Sedangkan Menurut Zaini Alif, seorang praktisi dan budayawan muda masyarakat Sunda, terdapat beberapa pandangan filsafat Sunda yang mendasari pemahaman tentang luasnya kehendak masyarakat Sunda untuk dapat menyelami dunia. "*Ulah jadi Sunda anu sarubak jaman, tapi kudu jadi Sunda anu saampar jagat*". Pandangan ini setidaknya

menjadi suatu pernyataan sikap tentang bagaimana budaya Sunda hari ini dapat dipahami bukan hanya sebagai representasi dari nilai-nilai lokal tetapi juga merupakan perspektif yang dapat dipahami secara universal. Hal ini terutama menyoroti bagaimana dunia kemudian dapat mengetahui bahwa masyarakat Sunda juga memiliki ilmu rasa (estetika), nilai-nilai, pandangan filsafat, dsb. Dalam konteks ini, kebudayaan Sunda semestinya dapat menyumbangkan kontribusi pemikiran bagi manusia sejagat raya demi terwujudnya kehidupan bersama yang lebih baik.[3]

Menurut Bapak Pangeran Djatikusumah dalam Pemahaman Agama dan Tradisi menurut Ajaran Spiritual Sunda Karuhun. Nilai-nilai budaya sunda tidak lepas dari konteks 'Kesundaan' maka pembahasan akan berawal dari :

a. Pandangan hidup orang Sunda
b. Kepercayaan orang Sunda sebelum agama-agama dari luar masuk
c. Adat dan tradisi spiritual Sunda Karuhun Urang

3.3.1 Pandangan hidup orang Sunda

Nilai budaya bersifat abstrak, namun memiliki nilai spiritual berdasarkan Sang Hyang Siksa Kanda'Ng Karesian (SSKK) nilai idealistic itu erat kaitannya dengan pandangan kehidupan (Manusia Sunda) yang meliputi :

a. Manusia dengan Sanghyang Kersa (Yang Maha Esa)
b. Manusia secara Pribadi
c. Manusia dengan sesame manusia (mahkluk sosial)
d. Manusia dengan Alam (ekologi)

[3] http://commonroom.info/2009/diskusi-etnologi-dan-budaya-masyarakat-sunda-common-room-5-maret-2009/

e. Manusia dalam mencapai kebahagiaan lahir dan batin

3.3.1.1 Manusia Dengan Sanghyang Kersa

"Nu kangkeun bijil ti nir mala ning lemah ma ngarana ingeut di Sanghiang Siksa, mikukuh talatah ambu bapa aki lawan buyut, nyaho di siksaan Maha Pandita, mageuhkeun ujar ning Kersa"

Yang arti nya "Dalam lagu kehidupan, manusia jangan lupa pada maha pencipta, dan jangan menyepelekan pesan-pesan leluhur bilamana ingin mencapai kebahagiaan / keparamartaan".

3.3.1.2 Manusia secara mahkluk pribadi

"Karma ma ngaranya pibudieun tingkah paripolah saka jalan ngaranya" yang arti nya "Prilaku dalam kehidupan pada perilaku kita sendiri baik berakibat suka maupun duka".

3.3.1.3 Hubungan manusia dengan Masyarakat

Harmoni, kerukunan, kedamaian dan ketentraman dalam pandangan kehidupan orang Sunda menduduki peringkat utama dalam urutan kebutuhan untuk hidup bersama dalam bermasyarakat. Mengalah demi untuk memenuhi kebutuhan itu merupakan perbuatan terpuji bukan aib dalam pandangan ornag Sunda, sepanjang tidak menyinggung nilai anutan atau kebenaran yang dianggapnya paling tinggi seperti : Harga diri, Kehormatan, Keyakinan, dan Kata (Suara) Hati, keributan, lebih baik menahan diri dengan diam, diam memendam rasa (pundung) daripada melawan dengan kekerasan atau adu otot, sehingga tampak dari luar seperti tidak ada keberanian, perlawanan dengan

kekerasan adalah pilihan yang paling akhir, semua ini melandasi perilaku dan peran sosial orang sunda dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3.3.1.4 Hubungan Manusia dengan Alam

Orang sunda memiliki pandangan bahwa alam dapat diatur sebagaimana mereka telah mempelajarinya untuk memanfaatkan alam itu dalam bentuk-bentuk atau situasi tertentu. Kesemuannya tampak tidak terlepas dari hakekat agar kelangsungan hidup terjamin, pengaturan oleh manusia ada batasnya karena adanya kesadaran terhadap pengaturan yang lebih diluar kemampuan manusia, pada titik batas semacam itu perlu terbentuk keseimbangan untuk tidak mengatur alam atau membiarkan alam sebaimana adanya. Penalaran semacam itu kemudian membentuk kearifan sehingga situasi-situasi yang diwujudkan baik artificial maupun natural menciptakan penyesuaian dalam diri manusia yang mampu menjaga keseimbangan dan melakukan penyesuaian kepada situasi.

Dalam SSK ditulis : *Mana kreta na bawana, mana hayu inking jagat, kena twah ning janma kapahayu* (maka sentosa dunia maka selamat jagat raya, karena perbuatang manusia yang selamat). *Trena, taru lata galuma, hejo lembok tumuwuh serba pala wowohan, dadi na hujan landing tahun, tumuwuh daek, makehueip na urang reya. Yang* arti nya (Rumput, pohon tumbuhan lara dan perdu, pada penghijauan tumbuh-tumbuhan, hujan turun sepanjang tahun, semua dapat tumbuh itulah (penunjang) kehidupan orang banyak). Bermakna bahwa, yang dianggap sebagai penunjang kehidupan ialah tumbuh-tumbuhan yang menghijau, hujan yang cukup turun setiap tahun sehingga dapat menyuburkan tanah.

Manusia dalam mencapai (mewujudkan kebahagiaan lahir dan batinditandai dengan kesadaran dirinya selaku manusia dan kesadaran pribadi selaku suatu bangsa, yang dalam penjawantahannya tercermin dengan adanya etika (tatakrama).

3.3.2 Kepercayaan Orang Sunda Sebelum Agama dari luar Masuk.

Dalam naskah SSK yang berisi sejumlah ajaran berupa rambu-rambu kehidupan dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Hiang, Sanghiang Tunggal). Sepintas naskah SSK sepertinya bersumber dari agama Hindu. Namun sebenarnya isi ajarannya, terutama etika, tata pergaulan dalam masyarakat, berasal dari ajaran sebelum agama Hindu. Mengenai hal-hal yang bersifat kepercayaan, sekalipun banyak terdapat istilah yang berasal dari bahasa Sangsekerta, sesungguhnya hanya berupa serapan istilah dari agama Hindu. Karena pada waktu itu sudah masuk agama Hindu ke Jawa Barat. Sebagai contoh yang sangat menonjol dalam hal ini adalah untuk peringkat “Dewata bakti ka Hyang” (Dewa berbakti kepada Hyang).

Hiang, yang merupakan asli Sunda, menempati peringkat paling tinggi, di atas “Dewa”, yang berasal dari agama Hindu. Demikian pula, tokoh-tokoh yang mempunyai kedudukan dalam tata kepercayaan, tokoh Rahiang Ri Menir sebagai tokoh sejarah, Katung Maralah dan Karung Kalah, ternyata bunyi dari nama-nama tersebut jauh dari bunyi nama-nama sangsekerta.

3.3.3 Adat dan tradisi spiritual Sunda Karuhun Urang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia :

Adat ialah, wujud gagasan kebnudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, normal, hukum, danaturan-aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi satu sistem. Sedangkan Batin, sesuatu yang terdapat di dalam hati, sesuatu yang mengenai jiwa (perasaan hati)

Kebatinan adalah Ajaran atau Kepercayaan bahwa pengetahuan kebenaran dan ketuhanan di capai dengan penglihatan batin. Selain itu ada juga pengertian lainnya tentang arti Kebatinan yaitu Ilmu yang mengajarkan jalan menuju ke kesempurnaan batin, suluk, tasawuf.

3.3.4 Budaya Spiritual Adat Karuhun Urang

Spiritual Adat karuhun urang merupakan budaya spiritual yang berunsur tuntunan luhur untuk berprilaku. Hukum ilmu suci yang dihayati dengan hati nurani, dengan kesadaran dan keyakinan terhadap Tuhan YME. Manusia memiliki rasa dan pikir yang melahirkan budi pekerti, dengan kehalusan budi pekerti itulah manusia mempunyai nilai-nilai moral serta ketulusan budi.

Menghayati Kepercayaan terhadap Tuhan YME berarti setiap warga harus yakin merasakan, memikirkan bahwa hidup dan kehidupan ini terwujud karena perpaduan serta yakin diantara ciptaan Tuhan YME sebagai pernyataan keagungannya. Menurut filsafat Sunda Karuhun, lingkaran hidup tersimpul dalam “ Sangkan Paraning Dumadi” yaitu suatu pandangan mengenai asal-usul hidup, perkembangan dan tujuan hidup yang pada umumnya diliputi oleh berbagai pernyataan sebagai berikut :

a. Asaling Dumadi (asal mula wujud, sesuatu yang berwujud)
b. Sangkaning Dumadi (dari mana datangnya hidup)
c. Purwaning Dumadi (permulaan hidup)
d. Tataraning Dumadi (derajat atau martabat wujud/manusia)
e. Paraning Dumadi (bagaimana dan kemana wujudnya berkembang)

Manusia harus menyadari kemanusiaanya disamping hidup sesuai dengan nalurinya, juga memiliki akal dan budi sehingga manusia tidak saja merasa hidup, melainkan juga dapat merasakan sedalam-dalamnya arti hidup dalam kehidupan, merasa dan rumasa bahwa wujud keagungan alam semesta hanyalah berasal dari Cipta dan Karsa Tuhan YME. Manusia disamping mengagungkan keesaan Tuhan, berkewajiban mewartakan kebesaran dan keagungan Tuhan, dimana setela merasa dan rumasa, maka budi nurani insan mewajibkan pula untuk menyembah Tuhan dalam imam dan percaya serta taat akan segala perintahnya, yang harus tampak pada perilaku keseharian.

Perilaku yang dituntut itu adalah perilaku yang selalu memakai cara-ciri manusia dan cara-ciri bangsa. Cara-ciri manusia meliputi :

a. Welas asih
b. Tata karma
c. Undak usuk
d. Budi daya budi basa
e. Wiwaha yuda na raga

Cara-ciri manusia adalah sifat umum(universal) yang ada pada setiap manusia yang sadar akan kemanusiaanya. Sedangkan cara-ciri bangsa adalah penggambaran dari keesaan Tuhan, bahwa kemaha agungan, kemaha besaran dalam cipta karsanya dan

keaneka ragamannya dengan masing-masing menjaga dan melestarikan hukum adi kodrati dalam nilai-nilai karakteristik bangsa dan nilai-nilai kemanusiaannya.

Manusia dituntut mewujudkan kesadaran diri, setiap manusia harus menyadari dan menghayati cara-ciri bangsa mau pun cara-ciri manusia, hal terungkap dalam tuntunan “Milaku Gawe Rahayu Pikeun Heubeul Jaya dina Buwana” yang artinya ; Melaksanakan awal yang baik dan bermanfaat untuk kelangsungan hidup damai dalam asih di Dunia.

Pandangan tentang manusia, dan ikatan dengan spiritual tanahnya, serta bangsanya merupakan hukum yang secara eksplisit terungkap dalam tuntunan “Roroning tunggal, tunggale ora dadi Sewiji”. Dengan kata lain sesuatu yang menunjukan berkecenderungan menjalin suatu ikatan, untuk saling melengkapi. Dalam artian tersebut. Kesatuan dalam beranekaragam, siang dan malam, wanita dan pria, bahagia dan derita dan sebagainya, sudah menjadi hukum adi kodrati dan saling melengkapi.